ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 1, Februari 2022: 106 - 119
10.33772/etnoreflika.v11i1.1476

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *KALO SARA* DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

KALO SARA-BASED DEVELOPMENT PLANNING MODEL AND ITS INFLUENCE ON COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT

Syaifudin Suhri Kasim[1], Sarmadan[2], Ratna Supiyah[3], Damsid[4]

[1,3,4]Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari Sulawesi Tenggara
[2]Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Email korespodensi: syaifudinsuhrikasim@gmail.com

Diterima: 5 Maret 2022; Direvisi: 26 April 2022; Disetujui: 1 Mei 2022

Copyright © 2022 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Kasim, S. S., Sarmadan, Supiyah, R., & Damsid. (2022). Model perencanaan pembangunan berbasis *kalo sara* dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *11*(1), 106–119. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1476

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of implementing the Kalo sara-based village development planning model is and its effect on increasing community participation in village development in Lambudoni Village, Andowia District, North Konawe Regency. Informants were selected with purposive sampling. The selected informants included: village head, village secretary, head or BPD member, traditional leaders and several local residents. Using a qualitative descriptive method, the data was collected through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method. The results show that the process of implementing Kalo sara-based village development planning started with the hamlet level for them to discuss what the main problems are in the area and the results are formulated in the form of a village development program. Thereafter, the results of the program formulation are then brought to the sub-district level to be discussed by the sub-district government along with residents and village officials, and the results are formulated into 2 (two) program priorities: main priority; and (2) supporting priority development programs. Kalo sara influences very significantly the level of community participation in village development because it contains the values of samaturu (mutual cooperation); medulu mepokoso (unity and integrity); ate pute penao moroha (holiness and justice); and morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro (prosperity and welfare) that be-

come the spirit or motivation for the community to keep participating actively in each of village development plans.

***Keywords:** planning, village development, kalo sara, participation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan model perencanaan pembangunan desa berbasis *Kalo sara* serta pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Informan ditetapkan secara *purposive sampling*. Informan terpilih antara lain: kepala desa, sekretaris desa, ketua atau anggota BPD, tokoh adat dan beberapa warga setempat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berbasis *kalo sara* diawali mulai dari tingkat dusun untuk mereka berdiskusi tentang apa yang menjadi permasalahan utama di wilayah tersebut dan hasilnya dirumuskan dalam bentuk program pembangunan desa. Setelah itu hasil rumusan program tersebut selanjutnya dibawah ketingkat kecamatan untuk dimusyawarahkan oleh pemerintah kecamatan bersama para warga serta aparat desa, dan hasilnya dirumuskan dalam bentuk 2 (dua) prioritas program, yaitu: Program pembangunan prioritas utama; dan (2) Program pembangunan prioritas penunjang. Adapun pengaruh *kalo sara* terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat tinggi sebab dalam *kalo sara* terkandung nilai-nilai *samaturu (*gotong royong); *medulu mepokoso (*persatuan dan kesatuan); *ate pute penao moroha (*kesucian dan keadilan*)*; serta *morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro (*kemakmuran dan kesejahteraan) yang menjadi spirit atau penyemangat masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci: perencanaan, pembangunan desa, *kalo sara*, partisipasi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah dijelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan aspirasi masyarakat harus selaras dengan keputusan pembangunan yang dihasilkan oleh legislative dan pemerintah.

Didalam keseluruhan proses pembangunan keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting. Sebab dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan maka partisipasi masyarakat selayaknya terlibat sepenuhnya mulai dari awal sampai akhir sehingga peran masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap saja kegiatan seremonial semata (Purnamasari, 2011)

Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terendah yang diberi kewenangan menjalankan fungsi tata kelola dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, diantaranya adalah kegiatan perencanaan pembangunan (Zainudin, 2016). Fungsi tersebut mutlak diperlukan baik dalam organisasi formal maupun non formal karena merupakan ide-ide dan pemikiarn warga desa dalam membangunan masa depan desa (Nugroho, 2010).

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa desa bertujaun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulagan kemiskinan serta pembangunan sarana dan prasarana

desa, melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya desa, baik sumber daya alamnya, budaya maupun sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan, diantaranya harus memberi manfaat sebasar-besarnya bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 6/2014).

Tentunya di setiap wilayah desa memperlakukan pembangunan dengan model-model yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari daerah tersebut ataupun dari masyarakat yang berada di daerah tersebut. Model yang digunakan seringkali diambil dari sistem budaya yang berlaku dan menjadi pedoman hidup masyarakat setempat. Sebab dengan menjadikan sistem budaya sebagai model, telah menjadikan masyarakat merasa berkewajiban untuk terlibat atau berpartisipasi secara sukarela dalam proses pembangunan. Sebab prakarsa, inisiatif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah terjadi pengelompokan, yang terdiri atas: pertama, partisipasi atas inisiatif sendiri atau partisipasi sukarela, dimana partisipasi datang dari insitaif dan Prakarsa warga atau kelompok-kelompok masyarakat desa tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah; dan kedua, ialah partisipasi yang muncul karena adanya paksaan bukan atas inisiatif dan prakarsa masyarakat tetapi lebih dikarenakan adanya mobilisasi masyarakat oleh pemerintah, sehingga masyarakat terlibat dalam proses pembangunan secara terpaksa. Intinya bahwa proses perencanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan *top dow*n ketimbang *button up*. Pendekatan *top down* dalam perkembangannya tidak lagi efektif, sehingga diperlukan adanya pendekatan dari bawah atau botton up dimana masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi objek dan subjek pembangunan tetapi justru masyarakat berperan sepenuhya dalam proses pembangunan secara menyeluruh (Purnamasari, 2011)

Era otonomi daerah sekarang ini, pendekatan pembangunan dari bawah perlu terus ditingkatkan. Hal ini sesuai Amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 63, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh komponen atau unsur terkait dalam masyarakat desa. Sehingga perencanaan pembangunan desa yang dihasilkan merupakan perwujudan dari ide-ide, inisiatif, prakarsa, dan kebutuhan dari masyarakat desa yang bersangkutan. (Legi, Rompas and Pombengi, 2015). Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif, sebab model perencanaan ini dipandang sebagai model yang paling baik dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan (Sopana, 2018).

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan secara partisipatif mengandung makna bahwa dari awal masyarakat melakukan analisis masalahnya, memikirkan alternatif pemecahannya, sampai pada tahap pengambilan keputusan bagaimana solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Perencanaan partisipatif penting karena: 1) Program pembangunan akan gagal jika masyarakat tidak dilibatkan, sehingga diperlukan informasi dari masyarakat tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; 2) Dapat menumbuhkan lahirnya rasa memiliki terhadap program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan masyarakat lebih mengetahui seluk beluk program sehingga perlu dilibatkan secara langsung mulai dari proses persiapan dan perencanaan pembangunan; 3) Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari awal merupakan suatu hak demokrasi masyarakat (Hendra Hamid, 2018)

Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta control terhadap pembangunan tersebut sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan menciptakan tabilitas politik, sebab mereka mengontrol langsung pembangunan yang sedang dilaksanakan (Sumartin & Kasim, 2017)

Secara politis partisipasi masyarakat merupakan perwujudan demokrasitisasi pada masyarakat desa karena: 1) Keterlibatan secara nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan; 2) Memperkuat posisi bargaining masyarakat secara politik sekaligus menambah pengetahuan politik masyarakat; 3) Membangun kekuatan solidaritas masyarakat lokal dalam proses pembangunan desa dan social kemasyarakatan (Islami, 2001; 5; Callahan, 2002; 299, dan Ebdon 2002; 275); dalam (Sopana, 2018)

Selain itu partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan dalam proses pembangunan saat ini, sebab melalui cara inilah kehidupan demokrasi didesa dapat dikembangkan, menumbuhkan swadaya dan prakarsa dan inisiatif serta peran serta masyarakat (Alfiaturrahman, 2016). Oleh karena itu, salah satu pendekatan yan dapat digunakan dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi didesa yaitu dengan menjadikan budaya sebagai basis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pembangunan secara umum, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Pentingnya budaya dalam perumusan kebijakan pembangunan telah dikaji oleh para ilmuwan, diantaranya Robert Bellah yang melakukan kajian budaya pada masyarakat Jepang dan China untuk mengetahui bagaimana proses kebangkitan ekonomi Jepang dan China menjadi salah satu negara poros ekonomi dunia sampai saat ini, ternyata menunjukan bahwa kebangkitan ekonomi tersebut sangat didasari oleh nilai budaya Shinto dan Konfuchu yang mengandung nilai-nilai patriotisme, kerja keras, disiplin, kerjasama, toleransi, solidaritas, kejujuran, dan berorientasi kemasa depan.

Demikian pula Slamet (2002:13), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) antara lain adalah faktor sosial budaya yang mencakup; norma, nilai kepercayaan, dan sikap. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut. Sehingga prinsip-prinsip partisipasi harus memperhatikan kebersamaan, tumbuh dari bawah (*bottom up*) dan kepercayaan dan keterbukaan.(Mustanir and Razak, 2017)

Oleh karena itu, dalam merealisasikan kehidupan demokrasi didesa, maka perencanaan pembangunan berbasis budaya perlu mulai dikembangkan dalam rangka mendorong dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara totalitas dengan merekam seluruh unsur *local knowledge* dan *cultural power* warga komunitas lokal yang sejak dahulu mereka telah jadikan sebagai pandangan dan pedoman hidup (*way of life)* dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosialnya (Peribadi, 2016).

Apalagi didalam *kalo sara* secara fungsional mengandung unsur norma-norma sosial yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi nyata, misalnya dalam kehidupan kekerabatan orang Bali, terdapat norma sosial yang harus ditaati oleh perempuan yang telah menikah agar mengikuti suaminya ketempat tinggal kerabatnya. Bilamana perempuan tersebut menolaknya, maka konskewensinya akan diceraikan oleh suaminya (Koodoh & Alim, 2011). Sehingga dengan demikian eksistensi budaya sangat penting dalam kehidupan masyarakat oleh karena secara fungsional mampu

mengintegrasikan masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupannya termasuk dalam aktivitas pembangunan desa.

Dengan demikian maka pokok pembahasan utama dalam artikel ini adalah pelaksanaan model perencanaan pembangunan desa berbasis *kalo sara* (simbol dan fokus utama kebudayaan orang Tolaki) dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan tersebut antara lain kepala desa dan perangkatnya, tokoh adat dan warga setempat. Data kualitatif diperoleh dari data primer sedangkan kuantitatif diperoleh dari beberapa laporan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data primer merupakan hasil dari observasi serta wawancara langsung dengan para informan dan dokumentasi sedangkan data sekunder diambil dari laporan pemerintah, jurnal maupun internet. Teknik pengumpulan data melalui: (a) Wawancara secara langsung kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat; (b) Observasi untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi pembangunan yang terjadi di desa tersebut; (c) Dokumentasi sebagai bahan informasi visual tentang apa yang terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalo sara sebagai Kebudayaan atau Lambang Adat-Istiadat

Dalam kehidupan suku Tolaki *kalo sara* telah ada dan digunakan dari zaman dahulu hingga saat ini, penggunaannya sangat banyak dalam aspek kehidupan seperti pada pemerintahan, perkawianan, bahkan dalam hal untuk mensejahterakan kehidupan seperti berburu, beternak, maupun bercocok tanam. Dalam perkawinan prosesi akad nikah tidak akan dilaksanakan kalau secara adat belum dilaksanakan dan diselesaikan, dalam berburu alat yang digunakan untuk menangkap hewan buruan menggunakan alat yang berbentuk seperti *kalo* yang disebut dengan *oho.* Begitupun juga dalam pemerintahan segala sesuatu keputusan yang ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarakan dengan masyarakat duduk bersama dan mendapatkan satu keputusan seperti bentuk bulatnya *kalo*.

Kalo sara sebagai moral kehidupan

Orang Tolaki menggunakan ajaran-ajaran *kalo* sebagai pedoman hidup, penggunaan *kalo* sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral, utamanya dalam mengatur hubungan-hubungan sosial diantara warga atau golongan-golongan masyarakat yang berbeda sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan atau kesalapahaman. Sehingga manakala terjadi pertentangan atau kesalahpahaman diantara warga atau golongan, maka Orang Tolak beranggapan bahwa terjadinya peristiwa tersebut disebabkan karena manusia telah melanggar ajaran-ajaran *kalo* yang secara implisit terkandung norma adat dan norma agama. Bahkan peristiwa tersebut dianggap telah melanggar ajaran *kalo* sebagai adat pokok, sehingga untuk dapat menyelesaikan permasalahannya maka harus diadakan upacara yang dalam pelaksanaannya digunakan *kalo*, upacara ini disebut *mosehe wonua*.

Upacara adat ini dipercaya dapat membantu mengembalikan keadaan yang diakibatkan karena adanya perilaku yang melanggar dan tidak sesuai dengan ajaran secara agama serta ajaran dari *kalo sara*, dengan melakukan upacara serta menjalani kehidupan seperti sebelumnya dengan tidak melanggar ajaran agama dan ajaran dari *kalo sara*, dengan adanya hal tersebut mengajarkan kita bahwa ada sebab akibat yang akan timbul dari perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku dimasyarakat atau yang kita yakini.

Kalo sara sebagai Pemersatu

Kalo sara sebagai pemersatu didalam kehidupan orang tolaki yang meliputi unsur seperti pertentangan konseptual antara tubuh dan jiwa manusia, dan beberapa jenis pertentangan dalam simbol-simbol kehidupan manusia secara holistik, baik yang nampak maupun tidak nampak sebagai sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Demikian pula adanya pertentangan konseptual antara dunia nyata dan dunia gaib semua itu dipersatukan oleh *kalo* yang berbeda-beda namanya dalam setiap pertentangan konseptual.

Munculnya pertentangan-pertentangan konseptual atau unsur-unsur dalam masyarakat, seperti antara bangsawan dengan rakyat kebanyakan, atau pemerintah dengan rakyatnya, maka dalam mempersatukannya kembali sebagai akibat dari adanya pertentangan tersebut maka orang Tolaki menggunakan *kalo* sebagai sarana untuk mempersatukannya kembali, sehingga keselarasan hidup dan kedamaian hidup diantara unsur-unsur atau golongan masyarakat dapat berjalan dengan normal.

***Kalo sara* sebagai sumber ide**

Kalo pada tingkat nilai budaya adalah sistem nilai budaya, yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Hal-hal yang paling bernilai bagi orang Tolaki dalam kehidupannya adalah apa yang disebut *samaturu* (gotong royong), *medulu mepoko'aso* (persatuan dan kesatuan), *ate pute penao moroha* (kesucian dan keadilan), dan *morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro* (kemakmuran dan kesejahteraan). Ide-ide ini dinyatakan oleh orang Tolaki melalui penggunaan *kalo* dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan.

Ide-ide tersebut selain diwujudkan dalam akativitas upacara-upacara adat, juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya diwujudkan dalam kegiatan pembuatan rumah yang disebut *mete'alo-alo* (bantu membantu) antara keluarga inti dengan keluarga luas atau antara kerabat luas dengan kerabat luas, dalam kegiatan pengolahan lahan pertanian, pemberian sumbangan berupa makanan dan minuman pada pesta-pesta terutama dalam pesta kematian dan perkawinan. Dan beberapa jenis ide lainnya seperti: ide kesucian, ide keadilan, ide kemakmuran dan ide kesejahteraan.

Implikasi dari makna nilai-nilai tersebut di atas telah memberikan pengaruh dalam kehidupan dan aktivitas sosial kemasyarakatan, termasuk dalam aktivitas pembangunan pada masyarakat suku Tolaki.

Pelaksanaan Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis *Kalo sara*

Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan pembangunan pada umumnya, perencanaan menjadi faktor utama dan pertama yang dilakukan ketika pembangunan suatu daerah atau wilayah akan dilaksanakan. Demikian pula halnya di desa Lambudoni Kecamatan Andowia dalam menyusun program yang menjadi priorotas utama dalam pembangunan desa, senantiasa diawali melalui musyawarah ditingkat dusun secara informal baru dilanjutkan ketingkat formalnya melalui Musrembangdes .Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Musyawarah rencana pembangunan merupakan perencanaan pembangunan bersama masyarakat yang merupakan panduan atau model pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan

bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.(Mustanir & Razak, 2017)

Dari hasil penelitian lapangan diperolah informasi bahwa perencanaan pembangunan desa di desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara menggunakan model perencanaan pembangunan desa berbasis *kalo sara*, yaitu sebuah model dimana dalam perencanaan pembangunan desa para warga duduk bersama-sama dengan membentuk lingkaran yang menyerupai model *kalo sara* untuk selanjutnya berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengidentifikasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan desa dan memutuskan secara musyawarah mupakat terhadap program pembangunan apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan bagaimana cara penyelesainya Model ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip perencanaan yang bersifat *button up planning*, sebab diyakini dengan menggunakan pendekatan ataupun prinsip *kalo sara*, maka warga masyarakat secara spontan dengan ikhlas dan penunh tanggungjawab akan terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan desa termasuk dalam proses pelaksanaannya kemudian. Sedangkan perencanaan dari atas *top down planning* sifatnya hanya melengkapi yang bertujuan untuk menyelaraskan antara visi pembangunan nasional dengan program pembangunan desa sehingga setiap warga dapat bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan program pembangunan desa dan hasil-hasilnya.

Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi adanya perumusan program pembangunan yang bersifat spasial atau lebih mementingkan kepentingan golongan atau kelompok masyarakat tertentu saja, yang dapat memunculkan adanya kecurigaan dan rasa apatis kelompok masyarakat lainnya terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut, sehingga berakibat pada gagalnya program pembangunan yang diimplementasikan di desa. Tetapi dengan melalui cara seperti ini, maka setiap masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut karena program tersebut merupakan hasil dari inisiatif, usulan dan kebutuhan masyarakat yang telah dirumuskan dan disepakati secara bersama-sama.

Inspirasi masyarakat dengan kades dan perangkatnya untuk menggunakan *kalo sara* sebagai basis dalam perencanaan pembangunan desa, berangkat dari pengalaman di daerah lainnya, dan pemahaman masyarakat setempat terutama para tokoh adat bahwa *kalo sara* mengandung nilai-nilai yang sakral yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki. Apalagi mengingat mayoritas warga di desa Lambudoni Kecamatan Andowia mayoritas adalah suku Tolaki, sehingga dipandang oleh masyarakat setempat, kepala desa dan perangkatnya sebagai model yang sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan dalam penyusunan rencana program pembangunan desa.

Hal ini sejalan pula dengan pandangan (Peribadi and Tawulo, 2021) yang menjelaskan bahwa ”Pranata *Kalo sara*” yang kini tetap disakralkan oleh etnis Tolaki/Mekongga menjadi model dalam penyelenggaraan Musrembang berbasis nilai budaya *kalo sara*, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Kemudian dengan adanya nilai-nilai sakral pada *kalo sara* maka diyakini oleh

masyarakat setempat bahwa semua warga masyarakat tanpa terkecuali dipastikan akan melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas pembangunan desa, sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program pembangunan di desa, karena semua warga masyarakat akan terlibat secara sukarela dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut tanpa melalui paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, penggunaan *kalo sara* sebagai pedoman dan pegangan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan aktivitas pembangunan telah menjadi model utama yang digunakan selama ini. Bahkan penggunaan *kalo sara* bukan hanya dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga digunakan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya yang dimaksudkan agar dalam menjalani kehidupan sosialnya masyarakat desa dapat saling bahu membahu dalam mewujudkan tujuan hidupnya dan tujuan pembangunan desa pada umumnya.

Model Perencanaan Pembangunan Button-up versi *Kalo sara*

Model perencanaan pembangunan dengan pendekatan *button up* planing adalah perencanaan yang dilakukan dimana inisitif dan prakarsa pembangunan sepenunhnya lahir dari bawah atau masyarakat desa sesuai kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan secara bersama-sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan sekaligus pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator. Perencanaan pembangunan dengan model *button-up* ini sudah ada sejak dulu, hingga saat ini model ini masih digunakan di daerah-daerah dalam perencanakan pembangunan. Dalam perencanaan ini dapat melibatkan semua orang baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahnya sehingga setiap permasalahan yang ada disetiap wilayahnya dapat teratasi dengan tepat karena memang melibatkan orang yang langsung merasakan dari permasalahan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan perencanaan desa dengan menggunakan model butto-up berbasis *kalo sara*, pertama-tama perencanaannya dilaksanakan melalui forum musyawarah tingkat dusun dimana Kepala Dusun mengundang warganya dirumahnya yang dihadiri oleh beberapa orang perwakilan warga untuk saling berdiskusi dan menjaring informasi tentang beberapa permasalahan mendasar dan menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Tentu saja ada banyak ide, inisiatif dan masukan dari warga tentang program apa yang menjadi perioritas utama, sehingga kepala dusun melakukan penjaringan yang dimaksudkan untuk memastikan dan memberikan arahan pada warga bahwa tidak semua program harus diakomodir sebab usulan program tersebut bukan hanya berasal dari dusun mereka tetapi ada juga beberapa dusun yang akan mengusulkan dan selanjutnya di musyawarahkan ditingkat desa. Oleh karena itu, kepala dusun berusaha menyampaikan sebelumnya kepada warga bahwa belum tentu program yang mereka sudah sepakati ditingkat dusun akan diakomodir seluruhnya tetapi masih perlu diseleksi lagi untuk diputuskan program pembangunan mana yang benar-benar sangat mendesak dan menjadi kebutuhan utama warga setempat. Penyampain yang dilakukan kepala dusun pada saat sebelum diakhiri pertemuan dimaksudkan agar masyarakat kelak tidak merasa kecewa jika ada salah satu usulan mereka yang tidak diakomodir dalam program pembangunan desa, sehingga semua pihak merasa *legowo* untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan program pembangunan yang dijalankan di desa mereka.

Selanjutnya hasil dari rumusan tersebut kepala dusunnya bersama beberapa perwakilan warga dari tingkat dusun bertemu dengan kepala desa serta aparat

pemerintah tingkat desa untuk membahas lagi lebih detail dan melihat dari skala prioritas mana yang menjadi kebutuhan dari warga setempat. Setelah kepala desa menerima usulan semua dusun tentang beberapa program yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kebutuhan dari warganya. lalu pemeritah desa mengundang seluruh warga dan para aparat desa serta pemerintah dari tingkat kecamatan untuk mengadakan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditingkat desa, dalam musyawarah tersebut semua permasalahan yang ada dimasyarakat yang berasal dari masing-masing dusun didiskusikan bersama serta apa saja yang menjadi solusi dari permasalahan untuk selanjutnya sama-sama dimusyawarakan. Setelah semua saran dan masukan diberikan, ditentukanlah apa yang menjadi program utama, solusi terbaik yang dapat menyelesaikan permasalahan dimasyarakat lalu diambil keputusan yang telah disepakati bersama masyarakat yang selanjutnya rencana pembangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah kecamatan untuk mendapat persetujuan.

Dalam musyawarah ditingkat desa telah dihasilkan kesepakatan penting yang dirumuskan dengan 2 (dua) program perioritas, yaitu: (1) program perioritas utama; dan (2) program prioritas penunjang. Program perioritas utama mencakup: Pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui: pembentukan kelembagaan ekonomi desa, peremajaan usaha pertanian dalam arti luas, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan pembangunan jalan usaha tani. Sedangkan program penunjang meliputi: rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa, pengembangan sumberdaya manusia perangkat desa, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam desa sebagai destinasi wisata desa.

Melalui mekanisme seperti ini, masyarakat berharap agar proyek-proyek pembangunan yang diturunkan di desa sesuai dengan program dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang secara politis. Oleh karena itu, program pembangunan yang diimplementasikan kedesa mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat desa baik secara moril maupun secara materil. Sehingga dengan adanya dukungan masyarakat yang kuat dalam implementasi program telah menjadikan desa dan warganya lebih dinamis dan hamper dipastikan tidak ada proyek pembangunan yang terbengkalai atau menjadi mubasir sebagaimana sering kita saksikan dibeberapa daerah, dimana proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan hanya menjadi lipsitik pembangunan desa disebabkan karena tidak adanya dukungan dan partsipasi dari masyarakat desa, apalagi jika proyek tersebut tidak sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Dengan demikian hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendekatan botton-up dengan menggunakan model *kalo sara* sebagai basis dalam perencanaan pembangunan desa, merupakan salah satu model yang cukup efektif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan, terutama ditingkat perdesaan, dimana kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan, dan seberapa besar keaktifan mereka dalam mendiskusikan masalah-masalah pembangunan di desanya, sehingga melahirkan berbagai macam program nyata sebagai solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam pembangunan.

Hal ini sejalan dengan temuan (Legi, Rompas and Pombengi, 2015) yang menyatakan bahwa pendekatan *bottom up* selalu mendapat dukungan dalam bentuk partisipasi dari masyarakat pada saat pelaksanaan rencana program pembangunan desa, dengan senantiasa terlibat dalam berbagai pertemuan dan musyawarah desa untuk memberikan sumbangan pemikiran

dan inisitif yang terkait dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya.

Model Perencanaan Pembangunan *Top-down* versi *Kalo sara*

Untuk saat ini model perencanaan top down sudah sangat jarang digunakan, karena kurang efektif dalam menangai permasalahan yang ada dimasyarakat, masyarakat hanya diberikan rencana untuk dapat mecapai target nasional yang telah dibuat sebelumnya. Padahal setiap daerah mempunyai permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda apalagi negara Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau mempunyai budaya yang berbeda-beda ditiap wilayahnya tentunya permasalahan yang ada berbeda-beda begitupun juga dalam solusi yang diberikan tidak dapat satu untuk semua wilayah.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan desa di desa Lambudoni Kecamatan Andowia berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa perencanaan pembangunan yang bersifat *top down* tidak lagi dipergunakan sepenunhnya dalam perencanaan pembangunan desa, sebab berdasarkan pengalaman selama ini program yang diturunkan atau diiplementasikan di desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga akibatnya menyebabkan program atau proyek tersebut menjadi mubasir karena tidak dimanfaatkan oleh warga desa.

Jadi perencanaan *top down* hanya digunakan saja untuk melihat apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah dan kemudian diselaraskan dengan beberapa program pembangunan desa, sehingga keberadaan program pembangunan desa tidak terlepas dari tujuan program pembangunan nasional dan daerah.

Penyelarasan program pembangunan desa dengan program pembangunan nasional dalam versi perencanaan berbasis *kalo sara*, tidak dilakukan begitu saja oleh pihak pemerintah desa, tetapi dilakukan melalui forum musrembang. Dimana dalam kegiatan musrembang tersebut pemerintah desa menyampaikan beberapa program pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat desa yang disusun dengan menetapkan pada 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Program Pembangunan Prioritas Utama; dan (2) Program Pembangunan Prioritas Penunjang.

Tujuan dari penyusunan program dengan cara tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah kabupaten menjaring dan menetapkan program pembangunan desa yang mana perlu diperioritaskan dan harus diselaraskan dengan program pembangunan nasional. Dengan tujuan agar program-program pembangunan desa yang utama dapat diakomodir, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik dan kekecawaan masyarakat sehingga dalam implementasinya tidak mendapat respon dari masyarakat, bahkan cenderung diabaikan dan tidak dimanfaatkan sehingga menjadi mubasir,

Oleh karena itu, program pembangunan desa yang diputuskan di tingkat daerah (kabupaten) selalu diupayakan agar tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan program pembangunan desa yang telah diajukan oleh pemerintah desa. Sebab pengalaman selama ini, program pembangunan yang diturunkan di desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa telah menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap pembangunan dan memberikan respon negatif terhadap hasil-hasil pembangunan desa.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa dan kecamatan, maka pada proses ini keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan sangat intens untjuk melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan legislative untuk tetap mengawal agar program-program utama yang telah disepakati dan ditetapkan ditingkat desa dan kecamatan tidak lagi berubah atau diabaikan oleh pemerintah kabupaten, sebab pengalaman selama ini aspirasi masyarakat desa yang dituangkan dalam bentuk program

pembangunan desa seringkali tidak diakomodir oleh pemerintah kabupaten dan hanya lebih mementingkan kepentingan pihak-pihak tertentu atau semata-mata hanya ditujukan untuk mensukseskan visi misi pemerintah daerah tanpa melihat kebutuhan masyarakat desa. Akibatnya program pembangunan yang ada hanya berorientasi proyek tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.

Pengaruh *Kalo sara* terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Sebagaimana kita ketahui bahwa *Kalo* pada tingkat nilai budaya adalah sistem nilai budaya, yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Hal-hal yang paling bernilai bagi orang Tolaki dalam kehidupannya adalah apa yang disebut *samaturu* (gotong royong), *medulu mepoko'aso* (persatuan dan kesatuan), *ate pute penao moroha* (kesucian dan keadilan), dan *morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro* (kemakmuran dan kesejahteraan) (Tarimana, 1998). Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Apalagi di dalam setiap nilai-nilai tersebut terkandung norma-norma sosial yang yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat dan mengandung sanksi sosial bila tidak dindahkan oleh masyarakat.

Aksi nyata dari implementasi nilai-nilai tersebut Nampak dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti dalam aktivitas pembangunan desa yang diawali dari kegiatan perencanaan pembangunan sampai pada tahap implementasi program pembangunan desa. Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan desa, masyarakat sangat respon dan antusias mengikuti musyawarah pembangunan ditingkat desa (Musrembangdes) sampai pada tingkat kecamatan (Musrembang) kecamatan.

Tingginya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut disebabkan mereka meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam *kalo sara* sebagai fokus dan simbol utama kebudayaan harus dipatuhi, sebab apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan mereka bahkan mereka akan dikucilkan dan diasingkan oleh anggota masyarakat lainnya.

Seperti halnya nilai *samaturu* (gotong royong) dimana nilai ini telah ada dan tumbuh berkembang sejak nenek moyang suku Tolaki ada. Nilai ini sangat nampak dalam aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya pada pembukaan lahan pertanian, mendirikan rumah, pesta pernikahan, kematian, pembersihan kampung dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas mendirikan rumah misalnya, para warga jika mereka tahu ada anggota warga lainnya yang akan mendirikan rumah maka secara serta merta tanpa diundang secara formal dari pihak yang akan mendirikan rumah, mereka akan datang untuk memberikan bantuan. Ada yang datang memberikan bantuan tenaga dan ada pula yang datang memberikan bantuan dalam bentuk materi, seperti: beras, gula pasir, garam dan minyak goreng dan bagi mereka yang cukup uang biasanya memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pada saat itu. Bahkan tidak jarang pada saat-saat mereka istirahat beberapa diantara warga seringkali mereka diskusikan tentang berbagai permasalahan desa. Oleh karena kitu, nilai-nilai gotong royong telah memberi implikasi yang sangat positif terhadap motivasi, kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap permasalahan pembangunan di desanya sehingga berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Londa, 2017) yang menjelaskan bahwa budaya *mapalus* (gotong royong) sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehingga peningkatan partisipasi masyara-

kat sangat tergantung pada seberapa besar atau seringnya budaya *mapalus* (gotong royong) diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Demikian pula halnya nilai *medulu mo pokoaso* (persatuan dan kesatuan), nilai ini diyakini oleh masyarakat suku Tolaki sebagai nilai yang harus dipatuhi oleh warga pemangku budaya dan menjadi perekat solidaritas sosial diantara warga, sebab apabila nilai ini tidak lagi dindahkan oleh warga masyarakat maka diyakini akan melemahnya ikatan-ikatan sosial kemasyarakatan, sehingga akan berdampak pada terganggunya harmonisasi dan melemahkan ikatan-ikatan sosial dan kekerabatan masyarakat, terutama pada sistem sosial kemasyarakatan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai ini senantiasa dipertahankan oleh masyarakat suku Tolaki dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan dan pembangunan desa. Sehingga implikasi nilai ini berpengaruh besar terhadap perhatian, kepedulian dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas pembangunan desa.

Selanjutnya untuk nilai-nilai *ate pute penao moroha* (kesucian dan keadilan), lebih dimaksudkan pada sifat kejujuran yang harus tetap dipertahankan oleh setiap warga, terutama bila mereka tidak hadir dalam suatu acara atau kegiatan yang melibatkan semua warga harus hadir. Mereka harus memberikan alasan yang sebenar-benarnya tanpa mengandung unsur manipulatif atau rekayasa sehingga kepercayaan warga terhadap yang bersangkutan tidak luntur, sebab jika yang bersangkutan tidak berlaku jujur maka berakibat pada terjadinya isolasi sosial warga masyarakat terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu dengan adanya kejujuran yang dimiliki oleh setiap warga maka diyakini pula bahwa setiap warga akan diperlakuan adil. Dalam arti bahwa, apabila ada bantuan untuk masyarakat yang berasal dari pemerintah daerah dalam bentuk apapun, mereka akan mendaptkan perlakukan yang sama dari pemerintah desa tanpa memandang golongan, kelompak dan asal muasalnya. Implikasi nilai ini dalam aktivitas pembangunan desa sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat, tanpa terkecuali pada kegiatan perencanaan pembangunan, sebab setiap warga dituntut untuk senantiasa hadir dalam setiap pertemuan atau musyawarah desa (Musrembangdes) dan atau dalam aktivitas pembangunan yang melibatkan seluruh warga, seperti pada kegiatan pembersihan kampung.

Kemudian nilai *morini mbu'umbudi monapa mbu'undawaro* (kemakmuran dan kesejahteraan), diyakini oleh warga bahwa nilai ini merupakan tujuan hidup masyarakat secara umum. Oleh karena itu, jika tujuan ini ingin dicapai maka tidak ada alasan bagi setiap warga masyarakat untuk tidak terlibat secara aktiv dalam setiap aspek dan proses pembangunan desa, sehingga implikasi dari nilai ini telah pula memberi pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Asmin, 2018) bahwa dimensi budaya sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi, termasuk dalam pembangunan desa, sebab dalam dimensi budaya terkandung nilai-nilai kesejahteraan, kebebasan dan keamanan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan hasil penlitian ini sejalan dengan penelitian Robert Bellah yang melakukan kajian budaya pada masyarakat Jepang dan China untuk mengetahui bagaimana proses kebangkitan eknomi Jepang dan China dan menemukan bahwa nilai-nilai budaya sangat berpengaruh signifikan terhadap kebangkitan ekonomi pada kedua negara tersebut. Sehingga temuan pada hasil penelitian ini memperkuat temuan peneliti sebelumnya tentang pengaruh budaya dalam pembangunan, dimana budaya sebagai moral kehidupan, sumber ide dan pemersatu telah mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembanhasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses pelaksanaan model perencanaan pembangunan desa berbasis *Kalo sara* diawali dengan musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat dusun dengan menyusun ide atau hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan diwilayah masing-masing, kemudian dilanjutkan musyawarah dengan pemerintah desa guna menetapkan apa yang menjadi prioritas pembangunan di desa. Lalu diadakanlah Musrembangdes yang dihadiri warga, pemerintah desa, serta perwakilan dari pemerintah kecamatan kemudian duduk bersama-sama secara melingkar seperti model kalo untuk membahas apa yang menjadi permasalahan, seperti apa solusi yang dapat dilakukan serta memutuskan bersama hal yang menjadi solusi dari permasalahan warga masyarakat di desa dan dirumuskan dalam bentuk program perioritas dan program penunjang, selanjutnya diajukan ketingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan sebagai program pembangunan desa; (2) *Kalo sara* dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya telah memberi pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sebab implikasi dari nilai-nilai tersebut telah memberi motivasi, perhatian dan kepedulian yang tinggi pada masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiaturrahman, P. (2016) Perencanaan pembangunan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan', *Jurnal Valuta*, 2(2), pp. 251–267.

Asmin, F. (2018) Budaya dan pembangunan ekonomi: Sebuah kajian terhadap artikel Chavoshbashi dan kawan-kawan, *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(2), pp. 190–212. doi: 10.25139/jsk.v2i2.516.

Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *De La Macca*. Juni 2018. Edited by M. S. Tuty Suciaty Razak, SH. Makassar.

Koodoh, E. E., Alim, A., Baharuddin. (2011). Hukum Adat Orang Tolaki. I, *Perpusnas*. I. Edited by R. M. Idaman Alwi, Raemon. Yogyakarta: TERAS.

Legi, R., Rompas, W. & Pombengi, J. (2015). Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 1(010), p. 1266.

Londa, M. E. L. G. B. T. V. Y. (2017). Pengaruh budaya mapalus terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tombasian atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).

Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017). Nilai sosial budaya pada partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APP-PTMA)*, (October), pp. 1–7. Available at: http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6.

Nugroho. (2010). Model ekonomi basis untuk perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Dinamika Pembangunan, 1(1), 23–30*. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/13968/1/

Peribadi. (2016). Study Participatory and Planning Budgeting Berbasis Kalosara (Sebuah Studi Komunitas di

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan).

Purnamasari, I. (2011) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), pp. 89–101.

Sekretariat Negara RI. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Sumartin M., Kasim, S.S., & Rusli, M. (2017). Partisipasi remaja dalam membangun desa (Studi di Desa Langere Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Neo Societal*, 2(3), p. 110493.

Tarimana, A. (1998). Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka.

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 1(2), 332. https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.607